

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PELALAWAN
DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL
DI KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

OLEH:

JAKA SAPUTRA
11375103543



**PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PELALAWAN
DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL
DI KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Strata I pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH:

JAKA SAPUTRA
11375103543



PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Jaka Saputra
 Nim : 11375103543
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan
 Dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Pelalawan

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



 Irdyanti, S.IP, MA
 NIP. 130 411 030

Mengetahui:

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial


 DR. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

Ketua Program Studi
 Ilmu Administrasi Negara


 DR. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jaka Saputra
 NIM : 11375103543
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Dalam
 Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Pelalawan
 Hari/Tanggal Ujian : Jum'at, 05 Februari 2021

PANITIA PENGUJI

KETUA PENGUJI


DR. KAMARUDDIN, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

PENGUJI I


Mashuri, MA
 NIP. 19770721 201411 1 002

PENGUJI II


Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si
 NIK. 130 717 057

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PELALAWAN DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DI KABUPATEN PELALAWAN

OLEH:

JAKA SAPUTRA
11375103543

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dalam penempatan tenaga kerja lokal di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2005, penempatan tenaga kerja lokal pada tahun 2019 masih belum optimal karena kurang dari 75%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dalam penempatan tenaga kerja lokal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik analisa data dengan cara mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian-kejadian dengan kalimat penjelasan secara kualitatif. Hasil

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dalam penempatan tenaga kerja lokal belum berjalan optimal karena belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Hal ini disebabkan karena keterampilan tenaga kerja lokal tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan keterbatasan informasi bagi para pencari kerja lokal sehingga pencari kerja lokal sulit mendapatkan pekerjaan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, banyaknya perusahaan yang berada di Kabupaten Pelalawan tidak menjadi jaminan bagi tenaga kerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah, dan kendala-kendala dalam penempatan tenaga kerja lokal adalah keterampilan kerja para tenaga kerja lokal masih belum sesuai dengan pasar kerja serta keterbatasan informasi bagi para pencari kerja

Kata Kunci: Peran, Dinas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja Lokal



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul **“Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Pelalawan”** diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian Munaqasyah pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, tentunya dengan maksud guna menyempurnakan skripsi ini. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, semoga mendapat pahala disisi Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua penulis : Bapak Kasri dan Ibu Yunarti, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta dukungan doa kepada penulis.
2. Kepada Iyoung Taufik, Adek Habib dan Adek Fadri terima kasih atas kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara
6. Ibu Irdayanti, S.IP MA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan nasehat, saran, dan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Semua Guru Sekolah dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis
8. Pihak Instansi-instansi yang terkait dalam pembuatan skripsi ini terutama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan yang dikepalai oleh Bapak Ir. ABD Rahman, MP untuk Bapak Syamsul Alam, S.Sos Bapak R. Jhoni Putra Anilin, SH Bapak Suferdi SKM, Ibu Rahati SE beserta para pegawai lain yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk Sahabat-sahabat Penulis, Doni Priadi, Andry Naldi, Arby Riski, Eko Apriadi, Wahyudi Rafsanjani, Rudi Satria, M. Rois dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas saran, semangat dan motivasinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Untuk teman-teman seperjuangan penulis, terutama lokal E angkatan 2013 Jurusan Administrasi Negara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas saran dan motivasinya.
11. Untuk kawan-kawan Kos Bang Yandi, Bang Ilyas, Bang Ramli, Fikri, Hasan dan Takdir terima kasih atas waktu dan kesempatan serta kebersamaannya.
12. Kemudian juga untuk keluarga besar KKN UIN SUSKA Riau Kampung Pematang tahun 2016, terimakasih atas semangat dan motivasinya.
13. Selanjutnya yaitu untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semuanya dan atas segala sesuatunya.

Semoga semua bimbingan, dorongan, bantuan, semangat, kasih sayang dan segala amal perbuatan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Amin.

Pekanbaru, 08 Februari 2021

Jaka Saputra
Nim.11375103543

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iv

DAFTAR TABELvii

DAFTAR GAMBAR.....viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Rumusan Masalah8

1.3 Tujuan Penelitian.....8

1.4 Manfaat Penelitian.....9

1.5 Sistematika Penulisan.....9

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik11

2.1.1 Ciri-ciri Kebijakan.....13

2.2 Implementasi Kebijakan15

2.2.1 Model-model Implementasi Kebijakan16

2.2.2 Faktor-faktor yang bekerja dalam proses implementasi.....19

2.3 Pemerintah Daerah20

2.4 Konsep Peran.....23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.5 Dinas Tenaga Kerja	28
2.6 Tenaga Kerja.....	29
2.6.1 Penempatan Tenaga Kerja	30
2.7 Pandangan Islam Tentang Kerja.....	33
2.8 Penelitian Terdahulu.....	34
2.9 Definisi Konsep	36
2.10 Konsep Operasional.....	36
2.11 Kerangka Pemikiran	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian Waktu Penelitian.....	39
3.2 Jenis Dan Sumber Data	39
3.3 Metode Pengumpulan Data	40
3.4 Informan Penelitian	41
3.5 Teknik Analisa Data	41

BAB IV AMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan.....	43
4.1.1 Letak Geografis	44
4.1.2 Pemerintahan	45
4.1.3 Perekonomian	46
4.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja	46
4.2.1 Visi Dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan.....	47
4.2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Pelalawan.....61

BAB V ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja

Lokal.....63

5.2 Kendala-Kendala Dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal

Di Kabupaten Pelalawan75

BAB VI ENUTUP

6.1 Kesimpulan.....80

6.2 Saran81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Table 1.1 jumlah pencari kerja imta (izin memperkerjakan tenaga asing) yang ditempatkan tahun 2019	3
Table 1.2 jumlah pencari kerja akad (antar kerja antar daerah) yang ditempatkan tahun 2019	5
Tabel 1.3 jumlah pencari kerja lokal yang terdaftar berdasarkan jenis kelamin	7
Tabel 1.4 jumlah pencari kerja lokal yang ditempatkan tahun 2019	7
Tabel 2.1 indikator penelitian	37
Tabel 3.1 informan penelitian	41
Tabel 4.1 kecamatan di kabupaten pelalawan.....	45
Tabel 5.1 program pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan skill tenaga kerja lokal	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka pemikiran	38
Gambar 4.1 struktur organisasi dinas tenaga kerja kabupaten pelalawan.....	62



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai bangsa yang sedang berkembang pada hakekatnya tidak terlepas dari berbagai bentuk fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam pembangunan. Titik sentral dari pembangun adalah pemberdayaan sumber daya manusia termasuk tenaga kerja. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya yang sifatnya menyeluruh di semua sektor daerah dan ditujukan pada perluasan lapangan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan, serta perlindungan tenaga kerja. Dalam pembangunan sektoral dan regional perlu selalu mengusahakan terciptanya lapangan kerja yang se-luas mungkin, demikian pula perlu ditingkatkan diberbagai sector secara terpadu untuk membina dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui pendidikan dan pelatihan kerja.

Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan kemampuan diri sebagai seseorang merasa hidupnya lebih berharga bagi dirinya, keluarga dan lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada setiap diri manusia yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Hal ini tercermin dalam undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga Negara republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya di Indonesia hal tersebut masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi permasalahan yang disebabkan banyaknya jumlah tenaga kerja Indonesia yang tidak terserap oleh lapangan kerja yang tersedia di Indonesia. Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang pada hakekatnya tidak terlepas dari berbagai bentuk fenomena-fenomena sosial yang ada. Pendirian-pendirian perusahaan besar di negeri ini adalah satu faktor penunjang yang amat berperan dalam proses pembangunan bangsa yang sedang dijalani.

Masalah ketenagakerjaan terus-menerus mendapat perhatian dari berbagai pihak, yakni pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat dan keluarga. Pemerintah melihat masalah ketenagakerjaan sebagai salah satu bahkan sentral pembangunan nasional, karena ketenagakerjaan itu pada hakekatnya adalah tenaga pembangunan yang banyak sumbangannya terhadap keberhasilan pembangunan bangsa termasuk pembangunan disektor ketenagakerjaan itu sendiri. Masalah-masalah sumber daya manusia terus meningkat khususnya berkenaan dengan supply tenaga kerja terampil, yang memiliki kemampuan adaptasi memadai, dan mampu menghadapi kerancuan-kerancuan yang ada.

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya yang sifatnya menyeluruh di semua sektor, daerah dan ditujukan pada perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan kerja. Pembangunan sektoral dan regional perlu selalu mengusahakan terciptanya lapangan kerja yang seluas mungkin. Upaya perluasan kesempatan kerja dilaksanakan melalui pertumbuhan ekonomi juga dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas penempatan tenaga kerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik, dicerminkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan rata-rata yang semakin baik, memberi dampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Begitu pula dengan upaya peningkatan keterampilan dan pelatihan tenaga kerja yang disertai dengan penerapan teknologi yang sesuai, berdampak pula terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Kebutuhan akan tenaga ahli yang professional serta kebutuhan akan teknologi-teknologi yang dapat mendukung suatu proses kerja, membuat perusahaan-perusahaan swasta, baik itu swasta asing maupun swasta nasional menggunakan tenaga kerja asing sebagai tenaga-tenaga kerja meskipun tetap mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal.

Table 1.1
Jumlah Pencari Kerja IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing)
yang Ditempatkan Tahun 2019

Pencari Kerja IMTA	Pencari Kerja IMTA yang Ditempatkan
16	16

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Pelalawan

Terbatasnya penggunaan tenaga kerja local tersebut di perusahaan-perusahaan yang ada dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja luar yang bekerja, yang mengisi lowongan dan jabatan diperusahaan. Dalam upaya memanfaatkan tenaga kerja lokal oleh perusahaan perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu peraturan daerah.

Adanya otonomi daerah maka setiap daerah memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkannya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintahan Daerah diberi kewenangan yang demikian luas oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Permasalahan tenaga kerja merupakan salah satu masalah pembangunan Provinsi Riau yang belum terpecahkan dengan baik sampai saat ini, seperti di Kabupaten Pelalawan penempatan tenaga kerja lokal yang belum terlaksana secara optimal oleh berbagai perusahaan dan unit-unit usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pelalawan khususnya. Sektor Industri merupakan sektor utama kabupaten pelalawan. Jumlah perusahaan yang terdaftar di tahun 2019 di kabupaten pelalawan mencapai 328 perusahaan.

Pemerintah kabupaten pelalawan menetapkan kebijakannya dengan mengeluarkan peraturan daerah nomor 03 tahun 2005 tentang penempatan tenaga kerja lokal. Peraturan daerah nomor 03 tahun 2005 ini dibuat guna mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja local dan untuk melindungi hak-hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenaga kerja lokal serta menghindari adanya kecemburuan sosial. Untuk terlaksananya peraturan daerah nomor 03 tahun 2005 tentang penempatan tenaga kerja lokal maka pemerintah kabupaten pelalawan telah menetapkan dinas tenaga kerja kabupaten pelalawan untuk menjalankan berbagai kewenangan agar tercapainya tujuan dari peraturan daerah tersebut.

Dalam hal ini dinas tenaga kerja kabupaten pelalawan akan menjalankan tugas dan fungsinya dibidangnya. peraturan daerah nomor 03 tahun 2005 tentang penempatan tenaga kerja lokal tersebut untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam penempatan tenaga kerja lokal yakni karna adanya perlakuan diskriminatif kepada tenaga kerja lokal dengan alasan bahwa keterampilan tenaga kerja lokal masih rendah, sehingga peluang tenaga kerja lokal untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan yang ada sangat kecil. Hal ini menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya kesenjangan ekonomi antara karyawan perusahaan dengan masyarakat sekitar. Untuk mengatasi masalah ini perusahaan-perusahaan yang ada untuk dituntut untuk berpartisipasi dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal dan bagi tenaga kerja luar daerah dituntut untuk menggunakan mekanisme AKAD (antar kerja antar daerah).

Table 1.2
Jumlah Pencari Kerja AKAD (antar kerja antar daerah)
yang Ditempatkan Tahun 2019

Pencari Kerja AKAD	Pencari Kerja AKAD yang Ditempatkan
2083	694

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Pelalawan

Dinas tenaga kerja melakukan himbauan kepada perusahaan-perusahaan yang ada agar menggunakan tenaga kerja lokal. Dalam penempatan tenaga kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

lokal yakni pada Perda Nomor 03 tahun 2005 pasal 5 yakni: Pengisian lowongan pekerjaan di perusahaan, Pengusaha atau pengurus wajib mengupayakan secara bertahap dalam 5 (lima) tahun pertama pengisian lowongan pekerjaan di perusahaan diisi oleh tenaga kerja lokal minimal 50% dan 5 tahun kedua minimal menjadi 75%. Pengisian lowongan jabatan di perusahaan, secara bertahap harus diisi oleh tenaga kerja lokal dengan komposisi sekurang-kurangnya 60% dalam batas waktu 10 tahun, dalam hal ini pengusaha atau pengurus wajib membuat perencanaannya. Pengusaha atau pengurus wajib membuat laporan setiap tahunnya tentang kemajuan persentase perkembangan komposisi lowongan pekerjaan dan jabatan diperusahaannya pada dinas yang menangani masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Pelalawan.

Penempatan tenaga kerja lokal dipandang lebih efisien dalam segala hal, baik waktu, tenaga, pembiayaan maupun birokrasinya lebih mudah karena ruang lingkupnya antar kabupaten. Penempatan tenaga kerja yang tidak mengikuti mekanisme sering terjadi di daerah kabupaten pelalawan dimana banyak tenaga kerja didatangkan dari luar kabupaten pelalawan untuk mengisi lowongan pekerjaan sedangkan masyarakat tempatan masih banyak yang bisa untuk mengisi lowongan pekerjaan. Tenaga kerja lokal belum secara optimal dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan atau unit-unit usaha yang beroperasi di kabupaten pelalawan. Masyarakat di kabupaten pelalawan saat ini masih banyak yang mencari kerja berdasarkan jenis kelamin pada table dibawah ini :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 1.3
Jumlah Pencari Kerja Lokal Yang Terdaftar Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2018	3235	2480	5715
2019	4358	3974	8332

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Pelalawan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pencari kerja lokal yang terdaftar setiap tahunnya meningkat, ini menunjukkan bahwa penempatan tenaga kerja lokal di kabupaten pelalawan masih belum optimal dilakukan. Untuk itu tenaga kerja lokal agar diberdayakan untuk mengisi lowongan dan jabatan pada perusahaan yang ada di kabupaten pelalawan, maka perusahaan berpartisipasi dalam menggunakan tenaga kerja lokal.

Table 1.4
Jumlah Pencari Kerja Lokal Yang Ditempatkan Tahun 2019

Pencari Kerja Lokal		Pencari Kerja Lokal yang Ditempatkan	
Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
4358	3974	1090	398
Total 8332		Total 1488	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Pelalawan

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah pencari kerja lokal mencapai angka 8332, sedangkan pencari kerja lokal yang ditempatkan hanya berjumlah 1488. Pada tahun 2019 seharusnya penempatan tenaga kerja lokal di perusahaan minimal 75%. Tetapi pada kenyataannya penempatan tenaga kerja lokal kurang dari 75%. Besarnya jumlah pencari kerja yang terdaftar di dinas tenaga kerja kabupaten pelalawan juga berpengaruh dalam skill atau keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja lokal. Para pencari kerja lokal yang terdaftar belum memiliki skill atau keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan lebih banyak merekrut tenaga-tenaga kerja dari luar daerah kabupaten pelalawan

yang memiliki skill atau keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga banyak tenaga kerja lokal yang tidak direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang berada di kabupaten pelalawan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian dengan judul **“Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Pelalawan”**

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dalam penempatan tenaga kerja lokal?
2. Apa saja faktor penghambat rendahnya penempatan tenaga kerja lokal di Kabupaten Pelalawan?

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dalam penempatan tenaga kerja lokal.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat rendahnya penempatan tenaga kerja lokal di Kabupaten Pelalawan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan penerapan tanggung jawab sosial secara efektif bagi Dinas Tenaga Kerja.

2. Bagi Universitas

Sebagai tambahan khasanah perpustakaan dan referensi bagi pihak-pihak lain dalam meneliti masalah selanjutnya di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti

Dapat memperluas wawasan berfikir serta pengetahuan peneliti dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang sudah diperoleh untuk dilaksanakan dilapangan.

5.1 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan beberapa teori yang melandasi penulisan penelitian ini, definisi konsep, konsep operasional, pandangan Islam tentang konsep penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis data dan sumber data, Informan penelitian, teknik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum Kabupaten Pelalawan dan profil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab tujuan penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan sebagai salah satu instrument dalam sebuah pemerintahan menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah. Secara etimologi, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahas Yunani, sangsekerta dan latin, “akar kata dalam bahasa Yunani dan sangsekerta adalah *polis* (negar-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa latin menjadi *politia* (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan”. (William N. Dunn, 2003:51)

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (dalam Subarsono, 2005:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is what ever government choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan raya rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi tersebut juga mengandung makna bahwa (1) kebijakan politik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Nugroho (2004:85) memberikan definisi bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Artinya, kebijakan publik dibuat sebagai instrument agar tujuan dari Negara bersangkutan dapat tercapai dan atau yang dicita-citakan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah tersebut dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Ealau dan Prewitt (dalam Edi Suharto, 2012:7) mengatakan kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang didirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Adapun menurut Titmuss (Edi Suharto: 2012:7) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Menurut Titmuss, kebijakan itu senantiasa selalu berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*).

Dari pendapat-pendapat tokoh diatas tentang kebijakan publik sejalan dengan pendapat Edi Suharto (2012:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Pengertian yang diungkapkan Edi, ada beberapa hal dalam kebijakan, sifatnya direncanakan/dipersiapkan, dijadikan sebagai pedoman atau acuan, dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mengimplementasikan sifatnya konsisten dan kebijakan itu dibuat pasti ada tujuan yang hendak dicapai. Robert C. Wood (dalam Willian N. Dunn, 2003:107) masalah kebijakan (*policy problem*) adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik.

Analisis kebijakan adalah salah satu diantara sejumlah banyak aktor lainnya didalam sistem kebijakan. Suatu sistem kebijakan (*policy system*) atau seluruh pola institusional dimana didalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik diantara tiga unsur, yaitu: kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

Pembuat kebijakan publik adalah para pejabat-pejabat publik, termasuk para pegawai senior pemerintah (*public bureaucrats*) yang tugasnya tidak lain adalah untuk memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan publik/kemaslahatan umum (*public good*). Dalam hubungan ini para ahli, seperti Fister Busch (1983) membagi kebaikan publik itu dalam 5 (lima) unsur: keamanan (*security*), hukum dan ketertiban umum (*law and order*), keadilan (*justice*), kebebasan (*liberty*) dan kesejahteraan (*welfare*). (dalam Solihin Abdul Wahab, 2004:47).

2.1.1 Ciri-Ciri Kebijakan

Menurut Dunn yang sebagaimana (dalam Budi Winarno, 2002:53-54) mengemukakan setidaknya ada empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu:

1. Saling ketergantungan. Masalah-masalah kebijakan dalam suatu bidang (misalnya: energi) kadang-kadang mempengaruhi masalah- masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebijakan dalam bidang lain (misalnya, pelayanan kesehatan dan pengangguran). Pada kenyataannya, seperti dinyatakan oleh Ackoff, masalah-masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari seluruh sistem masalah yang disebut sebagai messes, yaitu suatu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan di antara segmen-segmen masyarakat yang berbeda.

2. Subyektivitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif. Masalah kebijakan “adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentu; masalah tersebut merupakan elemen dari suatu situasi masalah yang diabstraksikan dari situasi tersebut oleh analis. Seperti telah disinggung di muka, suatu masalah tidak dapat mendefinisikan dirinya sendiri, tetapi ia harus didefinisikan oleh individu kelompok yang berkepentingan. Proses ini melibatkan pengalaman-pengalaman subyektif individu yang bersangkutan.

3. Sifat buatan. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil penilaian subyektif manusia, masalah kebijakan itu juga bias diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial obyektif, dan karenanya masalah kebijakan dipahami, dipertahankan dan diubah secara sosial.

4. Dinamika masalah kebijakan. Ada banyak solusi yang bias ditawarkan memecahkan suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap

masalah-masalah tersebut. Cara pandang orang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

2.2 Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu kebijakan.

Menurut Grindle (dalam Harbani Pasolong, 2008:57-58), implementasi kebijaksanaan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya, melihat bahwa implementasi kebijaksanaan sarat dengan kepentingan politik karena yang membuat kebijakan adalah Eksekutif dan Legislatif, kedua lembaga ini adalah lembaga politik tentulah kebijakan tersebut tidak terlepas dengan kepentingan politik/kekuasaan.

Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardi (dalam Harbani Pasolong, 2008:57), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Sejalan yang diungkapkan Hinggis (dalam Harbani

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pasolong, 2008:57), implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Artinya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan mesti ada instrument baik SDM, SDA, dan lainnya yang dimungkinkan dapat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sebatier (dalam Solichin, 2006:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Selanjutnya Robert Nakamura dan Frank Smallwood (dalam Tangkilisan, 2003:17), ada hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan kedalam keputusan yang bersifat khusus. Pendapat Robert dan Nakamura diatas menjelaskan bahwa kebijakan dibuat dari proses identifikasi masalah kemudian dirumuskan dalam bentuk kebijakan/program.

2.2.1 Model-model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argument bahwa perbedaan- perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan Donald Van Metter

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2014:142) yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dikatakan berhasil.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntu adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh cirri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindak laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksanaan yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran pertama.

4. Sikap kecenderungan para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (top-down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam prospektif yang ditawarkan Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasi kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Bekerja Dalam Proses Implementasi

Menurut Goggin (dalam Edwan Agus Purwanto, 2012:89), kebijakan diasumsikan sebagai suatu pesan dari pemerintah federal (pusat) kepada pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi pesan tersebut sangat dipengaruhi tiga hal pokok:

1. Isu kebijakan (*the content of the policy message*);
2. Format kebijakan (*the form of the policy message*);
3. Reputasi aktor (*the reputation of the communicators*).

Isu kebijakan meliputi sumber daya, manfaat kebijakan serta keterlibatan publik. Format kebijakan terdiri dari kejelasan kebijakan (*policy clarity*), konsistensi kebijakan (*policy consistency*), *frequency* serta penerimaan isu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan (*receipt of message*). Sedangkan *reputation of communicators* terdiri dari legitimasi dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah daerah.

Kinerja pelayanan publik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kewenangan diskresi, yaitu langkah yang ditempuh oleh administrator untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu yang tidak atau belum diatur dalam suatu regulasi yang baku.
2. Orientasi terhadap perusahaan, menunjukkan sejauh mana kesediaan aparat birokrasi menerima perubahan.
3. Budaya paternalism, merupakan sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan.
4. Etika pelayanan, dilihat dari apakah seorang aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merasa mempunyai komitmen untuk menghargai hak-hak dari konsumen untuk mendapatkan pelayanan secara transparan, efisien dan adanya jaminan kepastian pelayanan.
5. Sistem isentif, berupa pemberian penghargaan materi maupun non materi kepada karyawan yang berprestasi untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Sedangkan bagi karyawan yang tidak berprestasi diberikan disisentif berbentuk teguran, peringatan, penundaan/penurunan pangkat atau pemecatan.
6. Semangat kerja sama dikonsepskan sebagai keterpaduan tim.

2.3 Pemerintah Daerah

Mengingat wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sabang-merauke, yang terdiri dari kota besar dan kota kecil dengan rentang geografis yang sangat luas dan beraneka ragam sosial budaya. Maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai suatu konstitusi berkeinginan untuk mengatur pemerintah daerah, hal ini sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 18 UUD 1945 yang sebelumnya di amandemen menegaskan sebagai berikut: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut yang menetapkan bahwa bentuk dari susunan pemerintahan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sistem pemerintah daerah, maka dalam penyelenggaraan sistem pemerintah daerah sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan era reformasi, sudah beberapa kali pemerintah membentuk Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut, masing-masing saling menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi serta tuntutan masyarakat sehingga lahirlah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan digambarkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang memberikan hak otonom bagi masing-masing daerah untuk mengurus dan mengelola rumah tangga daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat sendiri. (Kansil, 2008:141)

Sesuai dengan ketentuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas, sistem pemerintahan rumah tangga daerah tersebut adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Harus menjamin keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam bidang pengaturan maupun dalam bidang pengurusan rumah tangga daerah.
 2. Pada dasarnya urusan rumah tangga daerah bersifat asli, bukan sesuatu yang diserahkan oleh satuan pemerintahan tingkat lebih atas, jadi pemerintahan daerah lah yang berinisiatif dan mengembangkan urusannya sendiri, bukan menunggu penyerahan dari pemerintah pusat atau pemerintah atasnya.
 3. Sebagai konsekuensinya dari butir (2) diatas maka sistem rumah tangga harus memberi tempat bagi prakarsa dan inisiatif sendiri dari daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan atau hal-hal yang dianggap penting bagi daerah-daerah mereka.
 4. Rakyat diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan mereka dengan jumlah urusan yang diserahkan pusat tapi harus sejalan dengan kepentingan masyarakat daerah sendiri.
 5. Urusan rumah tangga daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah tersebut.
 6. Sistem rumah tangga daerah harus mencerminkan kekuasaan antara pusat dan daerah dalam hubungan desentralistik. Setiap bentuk campur tangan pusat atas urusan rumah tangga daerah, tidak boleh mengurangi kemandirian daerah. (Kaho, 2005:21)
- Pemerintah daerah adalah sub sistem dalam sistem pemerintahan Negara. Oleh karena itu tujuan yang diemban pemerintah daerah adalah sama dengan tujuan yang diemban pemerintah pusat dalam mewujudkan cita-cita nasional

sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Pada saat ini pemerintahan kota maupun desa telah memiliki wewenang untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Hal ini diatur pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terlahir untuk kepentingan masyarakat.

2.4 Konsep Peran

Istilah peran dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" mengacu pada pelaku (film), pelawak makyong, perilaku yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang berdomisili di komunitas. Perannya adalah seperangkat harapan manusia tentang bagaimana individu harus berperilaku dan bertindak dalam situasi tertentu sesuai dengan status dan fungsi sosial mereka. Dengan demikian, kata "peran" berarti sesuatu dalam bentuk orang, benda atau properti yang memegang kepemimpinan atau karena sesuatu atau peristiwa.

Peran adalah aspek dinamis dari posisi (status), jika seseorang menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka ia memainkan peran. Dari uraian di atas, kita akan melihat nanti tentang pendapat lain tentang peran yang telah ditentukan yang disebut peran normatif. Sebagai peran normatif dalam kaitannya dengan tugas dan kewajiban penegakan hukum dari layanan transportasi, ini berarti penegakan penuh hukum, yaitu, implementasi penuh dari hukum.

Peran ideal dapat diterjemahkan oleh peran yang diharapkan oleh pemegang peran. Misalnya, agen transportasi, sebagai organisasi formal tertentu, harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memainkan peran pelindung komunitas di dalam kepolisian untuk mencapai ketertiban, keamanan yang tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. untuk menjadi komunitas, oleh karena itu peran nyata.

Peran adalah aspek dinamis dari status seseorang, sedangkan status adalah seperangkat hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang jika seseorang memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan posisi mereka, dia kemudian memenuhi fungsi. Intinya, peran tersebut juga dapat dirumuskan sebagai serangkaian perilaku tertentu yang timbul dari posisi tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu dilakukan. Peran yang dimainkan pada dasarnya tidak berbeda, dua dimainkan/dimainkan oleh para pemimpin tinggi, sedang dan rendah akan memiliki peran yang sama.

Peran mencakup norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat dalam masyarakat. Peran dalam pengertian ini adalah serangkaian aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Peran adalah konsep perilaku apa yang dapat diadopsi oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran tersebut juga dapat digambarkan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah urutan yang berurutan yang dihasilkan dari suatu posisi. Manusia, sebagai makhluk sosial, cenderung hidup berkelompok. Dalam kehidupan kelompok, akan ada interaksi antara anggota komunitas dan anggota komunitas lainnya. Pertumbuhan interaksi di antara mereka adalah saling ketergantungan. Dalam kehidupan sosial muncul apa yang disebut peran. Peran adalah aspek dinamis dari posisi seseorang. Jika seseorang menggunakan hak dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya sesuai dengan posisinya, orang tersebut akan mengambil peran.

Secara umum, ada perasaan yang berkembang bahwa negara-negara berkembang, atau yang belum berkembang, memerlukan peran dan fungsi yang lebih besar di pihak pemerintah. Meskipun implementasi peran dan fungsi bervariasi. Peran pemerintah sebagai reformis dan penggerak pembangunan (agen pembangunan) diakui, tetapi bagaimana hal ini dapat dicapai melalui inisiatif kepemimpinan dan konsultasi dengan semua negara, atau melalui pembebasan sektor tersebut. sektor swasta, cukup luas atau dengan rencana pembangunan di mana pemerintah memberikan peran kepemimpinan secara tidak langsung (menggunakan banyak upaya melalui mekanisme pasar/harga) untuk merangsang pengembangan kegiatan sosial-ekonomi komunitas yang lebih luas.

Peran pemerintah juga dapat dilihat dalam tiga bentuk sebagai berikut:

1. Pada awalnya, pemerintah memainkan peran sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam pembangunan. Bahkan, fungsi pemungutan pajak seringkali tidak didedikasikan untuk kepentingan rakyat. Ini adalah peran paling tradisional dari pemerintah.
2. Kemudian muncul pemahaman tentang keadaan layanan, di mana peran pemerintah adalah secara sosial melayani kebutuhan yang harus diatur dalam masyarakat. Ini juga didasarkan pada banyak refleksi pada negara kesejahteraan atau negara kesejahteraan.
3. Tetapi ada juga cara untuk mengimplementasikan peran pemerintah yang memberi pemerintah peran wirausahawan atau pendorong inisiatif bisnis untuk pembaruan dan pengembangan masyarakat. Pemerintah adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"agen pembangunan" atau mesin pembaruan/pengembangan.

Irving Swerdlow dapat mengungkapkan klasifikasi lebih lanjut tentang bagaimana memenuhi peran pemerintah ini, dengan mengatakan bahwa keterlibatan pemerintah dalam proses pengembangan kegiatan masyarakat (jika proses pembangunan lebih positif) dapat dilakukan dalam lima cara berbeda:

1. Operasi langsung (operasi: pada dasarnya, pemerintah mengelola kegiatan tertentu sendiri.
2. Kontrol langsung (*direct control*): penggunaan izin, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lainnya), penjatahan dan lainnya. Hal ini dilakukan oleh lembaga pemerintah yang merupakan "tindakan lader" (diizinkan dalam berbagai izin, tunjangan, tarif, dll.) Atau sebaliknya, cobalah untuk menjadi lader tindakan.
3. Kontrol tidak langsung (kontrol tidak langsung): suatu cara untuk menyediakan pengaturan dan kondisi, misalnya, pengaturan penggunaan dana tertentu dalam mata uang asing diperbolehkan, disediakan untuk "daftar barang-barang tertentu"
4. Pengaruh Langsung (*Direct Influence*): Persuasi dan konseling dilakukan: misalnya, untuk kelompok orang tertentu untuk dapat berpartisipasi dalam keanggotaan koperasi tertentu atau akseptor program keluarga berencana.
5. Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Influence*): Ini adalah bentuk implikasi sekecil apa pun. Misalnya, hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijakan pemerintah, memberikan contoh-contoh ketepatan efisiensi dan ketidakkekalan. Ada contoh lain dari saran dan pembinaan untuk lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

reseptif terhadap hal-hal baru (mempromosikan sikap reseptif terhadap inovasi).

Peran adalah konsep fungsional yang menjelaskan fungsi (tugas) seseorang dan dibuat berdasarkan tugas nyata yang dilakukan oleh seseorang. Peran ini adalah seperangkat harapan manusia tentang bagaimana individu harus berperilaku dan bertindak dalam situasi tertentu sesuai dengan status sosial dan fungsi mereka. Peran sosial adalah harapan sosial (sosial) tentang perilaku dan sikap yang terkait dengan status tertentu, terlepas dari kekhususan mereka yang mendukung status itu.

Peran adalah proses status yang dinamis. Jika seseorang menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, ia memenuhi peran. Perbedaan antara posisi dan peran adalah untuk kepentingan sains. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung yang lain dan sebaliknya. Seperti yang dikemukakan oleh Ralph Linton, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, tidak ada peran tanpa posisi atau posisi tanpa peran. Seperti halnya posisi, peran juga memiliki dua makna.

Setiap orang memiliki beragam peran yang berasal dari pola interaksi sosial. Ini juga berarti menentukan apa yang dilakukan untuk komunitas dan peluang apa yang ditawarkan komunitas. Pentingnya peran ini terletak pada kenyataan bahwa itu mengatur perilaku seseorang, yang membawa seseorang ke batas-batas tertentu untuk memprediksi tindakan orang lain. Orang yang bersangkutan dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang-orang dalam kelompok. Seseorang masih berhubungan dengan pihak lain. Biasanya,

masing-masing pihak memiliki seperangkat peran tertentu.

2.5 Dinas Tenaga Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang tenaga kerja ;
2. Menyelenggarakan urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja;
3. Melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas di bidang tenaga kerja;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian umum dan kepegawaian;
 - b. Sub Bagian perencanaan dan keuangan;
3. Bidang Penempatan Tenaga dan Perluasan Kerja, terdiri dari:
 - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja;
 - c. Seksi Perluasan Kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja, terdiri dari;
 - a. Seksi Persyaratan Kerja;
 - b. Seksi Organisasi Pekerja dan Pengusaha;
 - c. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2.6 Tenaga Kerja

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Pokok Ketenagakerjaan pasal 1 disebutkan: “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan menurut

Subri (2002:22), Tenaga Kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi, kemampuan yang tepat guna, berdaya guna, berprestasi dalam kategori tertentu untuk bekerja dan berperan serta dalam pembangunan, sehingga berhasil guna bagi dirinya sendiri dan masyarakat secara keseluruhan (Simanjuntak, 2001:5).

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03 tahun 2005 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal disebutkan bahwa: “Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Pelalawan atau dari daerah lain

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang lahir di Kabupaten Pelalawan secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau berdasarkan perkawinan campuran”. Kemudian didalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03 tahun 2005 pasal 1 poin j ayat (2) disebutkan: “Pencari Kerja adalah Tenaga Kerja baik yang menganggur maupun yang masih bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang mendaftarkan diri pada Dinas/Kantor yang menangani masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Pelalawan atau lembaga yang ditunjuk”. Selanjutnya pada poin (n) disebutkan: “Pemberi Kerja adalah setiap pihak yang membutuhkan Tenaga Kerja”.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kerja adalah orang yang mampu secara produktif menghasilkan barang dan jasa melalui kontribusi tenaga maupun buah pikiran yang berguna bagi dirinya dan masyarakat.

2.6.1 Penempatan Tenaga Kerja

Penempatan tenaga kerja merupakan salah satu fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Selain dari pada itu, peranan dari Pemerintah Daerah dalam menyalurkan tenaga kerja yang baik dan tepat sasaran akan mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 32 ayat 1, 2 dan 3 menjelaskan:

1. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil dan tanpa diskriminasi;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan pemerataan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum;

3. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

Pelaksanaan penempatan tenaga kerja berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif serta adil dan setara tanpa diskriminasi (Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan). Penanganan masalah ketenagakerjaan dititik beratkan kepada upaya penempatan tenaga kerja melalui jalur-jalur kesempatan kerja.

1. Pendaftaran pengangguran

Untuk perencanaan kebutuhan tenaga kerja pada umumnya dan memenuhi permintaan tenaga kerja pada khususnya, diperlukan pendaftaran pengangguran (pencari kerja) melalui Dinas Tenaga Kerja di wilayah pencari kerja tersebut. Selama pencari kerja belum mendapatkan pekerjaan diwajibkan melapor kepada kantor di tempat pendaftaran sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan. Bila pencari kerja pindah alamat, hendaknya segera melapor ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dimana pencari kerja mendaftar.

2. Bursa Tenaga Kerja

Bursa tenaga kerja adalah suatu pengembangan Sistem Informasi Pasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kerja (IPK) atau Bursa Kesempatan Kerja (BKK) yang dapat memberikan informasi secara lengkap dan cepat untuk keperluan penyusunan pelaksanaan dan penyesuaian perencanaan tenaga kerja (Manulang, 2001:32).

Penempatan tenaga kerja merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan peranannya. Hal ini perlu dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dalam menempatkan tenaga kerja yang profesional sehingga menghasilkan tenaga kerja yang mampu bekerja sesuai dengan tujuan dari pengguna tenaga kerja.

Pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja lokal di Kabupaten Pelalawan diatur dalam Perda Kabupaten Pelalawan No. 03 tahun 2005 pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: “Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Lokal terdiri dari; (1) Dinas/Kantor yang menangani masalah ketengakerjaan di Kabupaten Pelalawan, (2) Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS).” Dan pasal 6 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: “(1) Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS) wajib memiliki Surat Izin Usaha Penempatan (SIUP), (2) Persyaratan untuk memperoleh SIUP LPPS akan diatur melalui Keputusan Kepala Daerah”.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dengan membuat Peraturan Daerah No 03 tahun 2005 untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi serta kecemburuan sosial antara karyawan perusahaan dengan masyarakat lokal bahkan dengan perusahaan yang bersangkutan, dan juga untuk mengetahui jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Pelalawan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Pandangan Islam Tentang Kerja

Kerja dalam istilah Islam sering disebut dengan istilah *amal* yang memiliki makna lebih luas daripada sekedar bekerja untuk mendapatkan upah. Dalam pandangan Islam, kerja bukanlah sekedar aktivitas yang bersifat duniawi, tetapi memiliki nilai transedensi. Kerja merupakan sarana untuk mencari penghidupan serta untuk mensyukuri nikmat Allah SWT yang diberikan kepada makhluk-Nya. Kerja merupakan salah satu cara yang *halalan thayyibah* untuk memperoleh harta (*maal*) dan hak milik (*al milik*) yang dibutuhkan untuk kehidupan. Dengan kerja seseorang dapat memperoleh hak milik yang sah sehingga orang lain tidak dapat menganggunya. Kerja juga merupakan aktivitas yang menjadikan manusia bernilai/berguna di mata Allah SWT dan Rasul-Nya, serta di mata masyarakat.

Rasulullah Muhammad SAW, para nabi, dan para sahabat adalah pekerja keras dan selalu menganjurkan agar manusia bekerja keras. Kebalikan dari kerja keras adalah pengangguran dan sikap bermalas-malasan. Islam sangat membenci pengangguran, peminta-minta dan sikap pasif dalam mencari maal. Allah telah memberikan suatu perumpamaan yang tegas tentang perbedaan antara penganggur dan peminta-minta ini dengan orang yang bekerja sebagai seorang yang bisu dan tuli dengan orang yang waras. Orang yang bisu dan tuli akan menjadi beban orang yang menanggungnya sehingga dia akan terhina dan realtif sulit untuk berbuat kebaikan. Sebaliknya, orang yang bekerja akan memiliki kekuatan untuk menegakkan kebaikan dan keadilan sehingga mendapatkan kedudukan yang mulia. Oleh karena itu Islam sangat mencintai umat Muslim yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Allah SWT menegaskan dalam QS Al-Jumu'ah Ayat 10:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan Shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak – banyak supaya kamu beruntung.”

Sebagian orang juga bersikap sangat pasif dalam bekerja dengan alasan bertawakal kepada Allah. Kadangkala mereka juga beralasan bahwa karena rejeki telah diatur oleh Allah SWT, maka tidak diperlukan kerja keras sebab kalau Allah memberi pasti rejeki datang dengan sendirinya. Ketawakalan kepada Allah seharusnya diwujudkan dalam kerja keras, sebab Allah tidak menurunkan rejekinya begitu saja dari langit. Keadaan seseorang tidak akan berubah jika manusia itu sendiri tidak berusaha untuk merubahnya sendiri.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu instansi pemerintahan yang bertugas dalam membantu masyarakat terkait bidang ketenagakerjaan dan bertujuan mengurangi jumlah pengangguran sehingga para tenaga kerja lokal dapat memperoleh harta dan hak milik yang dibutuhkan kehidupan serta membuat tenaga kerja lokal menjadi bernilai dan berguna di mata agama dan masyarakat.

2.8 Penelitian Terdahulu

Hendra Gusti Naim (2009) Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul skripsi Penyaluran Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dengan kesimpulannya, bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja belum sesuai dengan tujuan menciptakan kesempatan kerja bagi seluruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat Indonesia.

Dani Yudhisthira (2011) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam Penempatan Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru dengan kesimpulannya, bahwa peran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru belum optimal dalam memfasilitasi para pencari kerja dan dalam penempatan tenaga kerja.

Margaretha Riauni (2013) Universitas Riau dengan judul skripsi Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Pekanbaru Tahun 2012-2013 dengan kesimpulan bahwa Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru didasarkan pada payung hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002.

Vievin Noer Chynthia (2015) Universitas Riau dengan judul skripsi Efektivitas Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Bengkalis Studi Kasus di Kecamatan Mandau dengan kesimpulan bahwa Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kecamatan Mandau belum efektif karena banyak pencari kerja lokal yang tidak mengetahui tentang adanya lowongan pekerjaan.

Megawati (2015) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal Di Pekanbaru dengan kesimpulan pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 belum berjalan dengan baik.

Dari beberapa penelitian di paparkan diatas yang memiliki beberapa persamaan dengan penulis, namun dalam kaitan ini penulis lebih menekankan

pada peranan Dinas Tenaga Kerja khususnya bidang Penempatan dan Pelatihan kerja dalam penyaluran tenaga kerja lokal di Kabupaten pelalawan.

2.9 Definisi Konsep

Menurut Sanapiah Faisal (2010:107) konsep adalah suatu istilah yang menyatakan atau mewakili suatu pengertian tertentu. Dan juga sebagai suatu variabel dalam suatu penelitian.

Definisi konsep dari variabel yang akan diukur dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.
2. Penempatan adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberian kerja dalam pengisian lowongan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
4. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Pelalawan atau dari daerah lain yang lahir di Kabupaten Pelalawan secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau berdasarkan perkawinan campuran.

2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan-batasan atau rincian kegiatan operasional yang perlu dilakukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dan gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut.

Untuk memudahkan penelitian maka dibuat sebuah indikator penelitian, adapun indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pameran Job Fair/Bursa Kerja merupakan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dalam rangka memfasilitasi para pencari kerja sesuai dengan minat, bakat, kemampuan.
2. Pelatihan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan untuk meningkatkan skill tenaga kerja lokal.
3. Sarana dan prasarana merupakan hal pendukung Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dalam penempatan tenaga kerja lokal.
4. Pemantauan pelaksanaan merupakan suatu langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja lokal.

Tabel 2.1 Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Program kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal.	1. Menyelenggarakan Pameran Bursa Kerja / Job Fair.
	2. Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan.
	3. Menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan.
	4. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

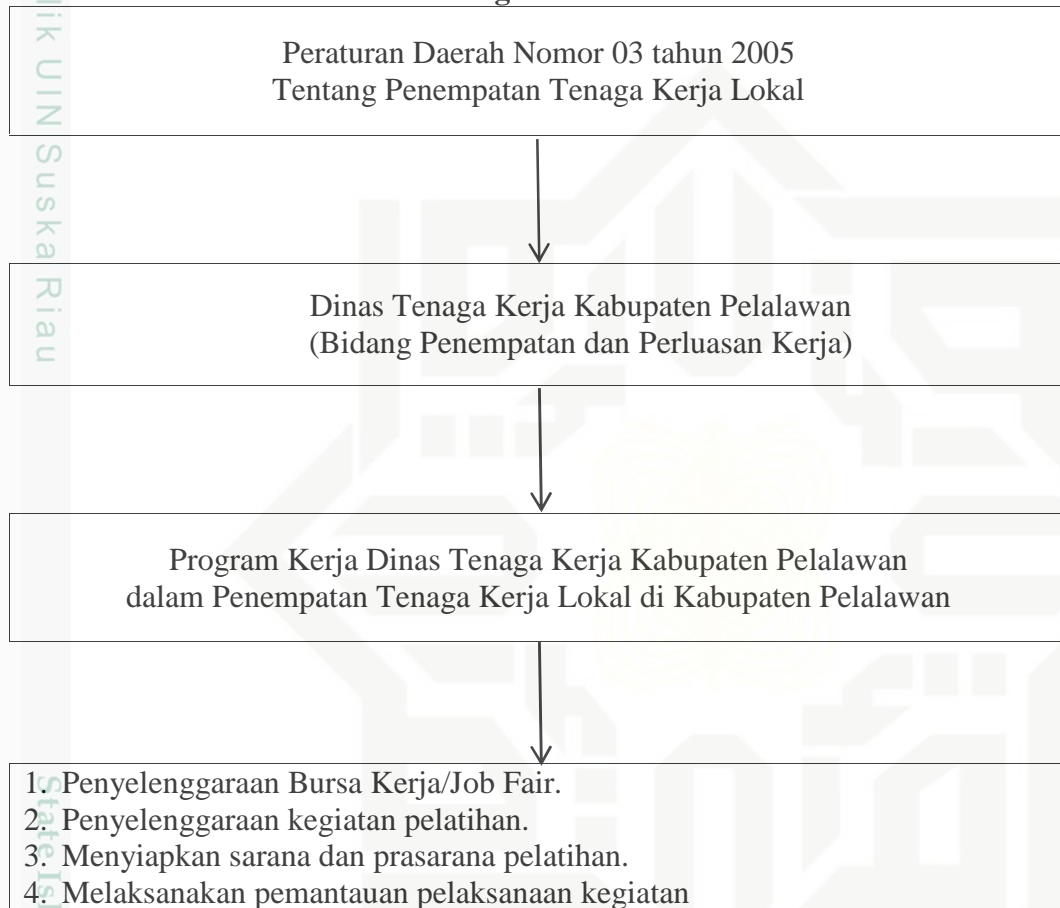
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Kerangka Pemikiran

Berikut gambar kerangka pemikiran dari indikator penelitian Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten pelalawan.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : Data Olahan 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan yang beralamat di Komplek Perkantoran Bhakti Praja. Jl. Karya Praja, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Dinas yang mempunyai peran dalam menangani langsung tentang permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Pelalawan. Penelitian dilakukan pada tahun 2020-2021.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian, karena inti dari penelitian adalah pencarian data yang nantinya akan terinterpretasikan dan di analisa. Menurut Loftland (dalam Moloeng, 2004;5) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen lainnya.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dilapangan yang diperoleh melalui data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penunjang yang relevan dengan kajian penelitian. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh atau didapatkan dari hasil publikasi atau data yang telah diolah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Husaini, 2011:52). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2011:166) mengemukakan bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses psikologis dan biologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Jadi, observasi adalah melakukan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat. Objek dalam penelitian ini adalah kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mendapatkan keterangan atau pendirian seseorang secara lisan dengan berbicara tentang sesuatu yang dialaminya atau diketahuinya (Sugiyono, 2011). Pihak yang menjadi narasumber untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Seksi Penempatan Kerja, Seksi Pelatihan dan Produktifitas serta Seksi Perluasan Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dan para pencari kerja.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Adapun dokumen tersebut berupa data, profil dan struktur organisasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian (Husaini, 2011:45). Penulis memilih informan yang penulis anggap mengetahui tentang masalah penelitian dan memilih *key informan* yang mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten pelalawan.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan	1
2	Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja	1
3	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja	1
4	Kepala Seksi Pelatihan Dan Produktivitas	1
5	Kepala Seksi Perluasan Kerja	1
6	Pencari Kerja Lokal	10

Sumber: Data Olahan 2020

Adapun yang penulis jadikan sebagai *Key Informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja. Pemilihan informan penelitian berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Berada di daerah penelitian;
2. Mengetahui kejadian / permasalahan;
3. Bisa berargumentasi dengan baik;
4. Terlibat langsung dengan permasalahan.

3.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan

data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian-kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif (Moloeng, 2004:6). Berikut ini tahap – tahap yang dipakai untuk menganalisis data :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat dan dapat membantu penulis dalam pengumpulan data.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan kata-kata yang bersifat deskriptif. Informasi yang diperoleh dari lapangan disajikan ke dalam kata-kata dengan sebaik mungkin tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh maka ditarik kesimpulan. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori– teori pendukung yang relevan dengan penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

Sejarah Nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang pusat kerajaannya berada di pinggir sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri tahun 1761, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachrudin (1811-1822). Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah pada tahun 1940 -1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu di antaranya adalah Kabupaten Pelalawan. Kabupaten ini memiliki luas 13.924,94 Km² dan pada awal terbentuknya terdiri atas 4 kecamatan, yaitu kecamatan: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara administratif terdiri atas 12 wilayah kecamatan, yang meliputi 106 Desa dan 12 Kelurahan. Kecamatan yang belum memiliki kelurahan, yaitu Kecamatan Bandar Seikijang dan Bandar Petalangan. Pada tahun 2001 kepala daerah Kabupaten Pelalawan ditunjuk oleh DPRD dengan pasangan H.T Azmun Jaafar dan H. Anas Badrun. Kemudian bulan Februari 2006, dilakukan pemilihan kepala daerah langsung pertama dengan pasangan terpilih H.T Azmun Jaafar dan Drs H Rustam Efendi

sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan periode 2006-2012. Pemilukada tahap kedua di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2012. Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Februari 2012 ditetapkan pasangan HM Harris dan Marwan Ibrahim sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan.

4.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Pelalawan dengan luas 13.924,94 km², dibelah oleh aliran Sungai Kampar, serta pada kawasan ini menjadi pertemuan dari Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar yaitu: Pulau Mendol, Pulau Serapung dan Pulau Muda serta pulau-pulau yang tergolong kecil seperti: Pulau Tugau, Pulau Labuh, Pulau Baru Pulau Ketam, dan Pulau Untut.

Struktur wilayah merupakan daratan rendah dan bukit-bukit, dataran rendah membentang ke arah timur dengan luas wilayah mencapai 93 % dari total keseluruhan. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi.

Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau upaten Sumatera antara 1,25 Lintang Utara sampai 0,20 Bujur Timur sampai 103,28 Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pelalawan kurang lebih 1.392.494 Ha atau 14,73 % dari luas wilayah Propinsi Riau (9.456.160 Ha).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.2 Pemerintahan

Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran Kabupaten Kampar, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999. Pada awalnya terdiri atas 4 wilayah kecamatan, yakni: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD No.138/1775/PUOD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan, yang terdiri atas 4 kecamatan induk dan 5 kecamatan pembantu, tetapi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Namun, setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 kecamatan :

Tabel 4.1
Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan

No.	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan
1	Bunut	Pangkalan Bunut
2	Langgam	Langgam
3	Pangkalan Kerinci	Pangkalan Kerinci
4	Pangkalan Kuras	Sorek Satu
5	Pangkalan Lesung	Pangkalan Lesung
6	Ukui	Ukui Satu
7	Kuala Kampar	Teluk Dalam
8	Kerumutan	Kerumutan
9	Teluk Meranti	Teluk Meranti
10	Pelalawan	Pelalawan
11	Bandar Sei Kijang	Sei Kijang
12	Bandar Petalangan	Rawang Empat

Sumber: Pemerintahan Kabupaten Pelalawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.3 Perekonomian

Sektor industri saat ini merupakan sektor utama dalam perekonomian Pelalawan. Besarnya kontribusi sektor industri mencapai 51,41% dari total PDRB tahun 2012. Selain itu, perekonomian Pelalawan juga didukung oleh sektor pertambangan. Ada dua jenis tambang yang ada di Kabupaten Pelalawan, yaitu minyak bumi dan gas bumi. Pada tahun 2012, produksi minyak bumi mencapai 572,69 ribu barrel dan gas bumi mencapai 5.716,76 ribu mscf.

Pada kabupaten ini terletak Kawasan Industri Kampar yang di dalamnya berdiri perusahaan bubur kertas dan produk kertas yaitu PT Riau Andalan Pulp and Paper. Di Daerah kabupaten Pelalawan terdapat beberapa perusahaan perkebunan besar yang dominan dimiliki oleh pengusaha-pengusaha yang bukan berasal dari riau seperti sinarmas dan RGE. Disamping itu perusahaan-perusahaan perkebunan sawit di Pelalawan bukan hanya dimiliki oleh pengusaha asal indonesia saja, bah kan ada juga dari negara-negara lain seperti malaysia.

4.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan adalah perangkat daerah yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan. Pembangunan di Bidang Tenaga Kerja dapat mengurangi angka pengangguran mengingat ada kecenderungan peningkatan penduduk sekitar 9,06 persen pertahun baik yang disebabkan tingginya angka kelahiran dan juga karena terjadinya urbanisasi penduduk secara signifikan ke Kabupaten Pelalawan, persentase jumlah penduduk pencari kerja berkisar antara 5-6% sementara angka kesempatan kerja sekitar 1,06%.

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan

1. Visi

Terwujudnya tenaga kerja yang handal dan terampil

2. Misi

- 1) menciptakan hubungan kerja yang harmonis diantara instansi pemerintah untuk menunjang optimalisasi otonomi daerah melalui peningkatan komepetensi aparatur Tenaga Kerja dengan menerapkan prinsip *good governance*.
- 2) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparatur Tenaga Kerja dalam pemanfaatan pertumbuhan IPTEK yang kompetitif dan berwawasan lingkungan.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya Tenaga Kerja.
- 4) Meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas ketenagakerjaan.
- 5) Meningkatkan koordinasi antar *stakeholders*, baik dalam usaha, serikat pekerja/buruh maupun pemerintah.
- 6) Mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan peran kelembagaan dunia usaha, serikat pekerja/buruh, maupun masyarakat lainnya baik peran kedalam Kabupaten Pelalawan maupun peran ke luar (global).

4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan

Tugas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja serta menyelenggarakan fungsi :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja
2. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Tenaga Kerja
3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas Tenaga Kerja.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- 2) Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

2. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan perlengkapan dan tata usaha,dengan uraian tugas sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan.
- 2) Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga dinas.
- 3) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat.
- 4) Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Sub. Bagian Penyusunan Program

Sub.bagian penyusunan program mempunyai tugas menyimpan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan sub.bagian penyusunan program berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- 2) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub.bagian penyusunan program serta kerangka acuan penyusunan program dan anggaran kegiatan.
- 3) Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan rencana kerja tahunan dinas, arah kebijakan umum RENJA SKPD dan LPJ serta LAKIP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sub.Bagian Tata Usaha

Sub.bagian tata usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistemasikan dan mengolah serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub.bagian tata usaha sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan.
- 2) Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup dinas dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai-pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas.
- 3) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub.bagian tata usaha sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan.

5. Sub.Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub.bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menghimpun, mengelola dan mengajukan data keuangan.
- 3) Menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan, belanja administrasi umum dari aparat pengawasan fungsional pemerintah.
- 4) Menghimpun daftar transaksi dokumen sumber dan informasi keuangan yang berisi jurnal, buku besar perbulan pemandu serta melakukan verifikasi atas kelengkapan dan dan kebenarannya.
- 5) Membukukan realisasi anggaran dinas dan penerimaan negara bukan pajak.

6. Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Kepala Bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian di bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja yang meliputi penempatan tenaga kerja, pengembangan pasar kerja, standarisasi kompetensi, pelatihan, pemagangan dan kewirausahaan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan perencanaan kegiatan bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja didasarkan kondisi daerah dan peraturan yang berlaku untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi bidang.
- 2) Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja untuk tercapainya keselarasan, keseimbangan dan kesatuan.
- 3) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan dibidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja melalui rapat, laporan berkala, laporan khusus atau instruksi tertulis maupun lisan untuk mengetahui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejauh mana hasil yang dicapai.

- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

7. Seksi Penempatan Tenaga Kerja

Seksi penempatan tenaga kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijaksanaan serta petunjuk teknis di bidang penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan, mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi penempatan tenaga kerja.
- 2) Mengadakan jumpa pengusaha untuk saling tukar informasi dalam rangka usaha penempatan tenaga kerja.
- 3) Melaksanakan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja dan lowongan pekerjaan.
- 4) Melaksanakan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja.

8. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja

Seksi pelatihan tenaga kerja memiliki tugas menyiapkan bahan-bahan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang pelatihan tenaga kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas seksi pelatihan tenaga kerja serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja, penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.
- 3) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan serta kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja.

9. Seksi Produktivitas dan Kewirausahaan

Seksi produktivitas dan kewirausahaan memiliki tugas menyimpan bahan-bahan bimbingan, melakukan bimbingan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan bidang produktivitas dan kewirausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistемasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi produktivitas dan kewirausahaan.
- 2) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas seksi produktivitas dan kewirausahaan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.

10. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Kepala Bidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dibidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi pengawasan norma kerja dan Jamsostek, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta bina penegakan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menyusun rencana dan program dibidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.
- 2) Penyusunan petunjuk teknis dan pedoman di Bidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.
- 3) Pelaksanaan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas.

11. Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek

Seksi pengawasan norma kerja dan jamsostek mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang pengawasan norma kerja dan jamsostek, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi pengawasan norma kerja dan jamsostek sebagai kerangka acuan pedoman penyusunan rencana kegiatan.
- 2) Melaksanakan pengawasan norma kerja dan pelaksanaan jamsostek diperusahaan
- 3) Melaksanaan pemantauan dan evaluasi yang berhubungan dengan tugas seksi pengawasan norma kerja dan jamsostek.

12. Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Seksi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan seksi pengawasan keselamatan kerja berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- 2) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai kerangka acuan pedoman penyusunan rencana kegiatan.
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja.

13. Seksi Bina Penegakan Hukum

Seksi bina penegakan hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang bina penegakan hukum, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan seksi bina penegakan hukum berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistемasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi bina penegakan hukum serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang bina penegakan hukum.

14. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek

Kepala Bidang pembinaan hubungan industrial dan jamsostek mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tugas-tugas dibidang pembinaan hubungan industrial dan jamsostek sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana dan program di Bidang pembinaan hubungan industrial dan jamsostek.
 - 2) Penyusunan petunjuk teknis dan pedoman di Bidang pembinaan hubungan industrial dan jamsostek.
 - 3) Pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan pembinaan kepesertaan jamsostek.
 - 4) Pelaksanaan tugas lain-lain yang diberikan kepala dinas
15. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial

Seksi pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang pencegahan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian hubungan industrial, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- 2) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial sebagai kerangka acuan pedoman penyusunan rencana kegiatan.
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial.

16. Seksi Pengupahan dan Jamsostek

Seksi pengupahan dan jamsostek mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang pengupahan dan jamsostek, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana dan program di bidang pembinaan pengupahan dan jamsostek
- 2) Penyusunan petunjuk teknis dan pedoman di bidang pengupahan dan jamsostek.
- 3) Pelaksanaan dan pembinaan pengupahan dan jamsostek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Seksi Persyaratan Kerja dan Kelembagaan Hubungan Industrial

Seksi persyaratan kerja dan kelembagaan hubungan industrial mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang persyaratan kerja dan kelembagaan hubungan industrial, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan seksi persyaratan kerja dan kelembagaan hubungan industrial berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- 2) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi persyaratan kerja dan kelembagaan hubungan industrial sebagai kerangka acuan pedoman penyusunan rencana kegiatan.
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang persyaratan kerja dan kelembagaan hubungan industrial.

18. Kepala Bidang Pembinaan Transmigrasi

Kepala Bidang pembinaan transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan membantu pimpinan dalam menyelenggarakan tugas di bidang pembinaan transmigrasi yang meliputi pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan pembangunan transmigrasi serta pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana dan program dibidang pembinaan transmigrasi.
- 2) Penyusunan petunjuk teknis dan pedoman dibidang pembinaan transmigrasi.
- 3) Pelaksanaan pembangunan pemukiman dan pembinaan warga transmigrasi baik dari segi sosial, budaya dan ekonomi.
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas.

19. Seksi Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Seksi pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan seksi pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- 2) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi sebagai kerangka acuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedoman penyusunan rencana kegiatan.

- 3) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

20. Seksi Pembinaan Pembangunan Transmigrasi

Seksi pembinaan pembangunan transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang pembinaan pembangunan transmigrasi, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan pembinaan pembangunan transmigrasi berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- 2) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi pembinaan pembangunan transmigrasi sebagai kerangka acuan pedoman penyusunan rencana kegiatan.
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan pembangunan transmigrasi.

21. Seksi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi

Seksi pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan seksi pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- 2) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi sebagai kerangka acuan pedoman penyusunan rencana kegiatan.
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi.

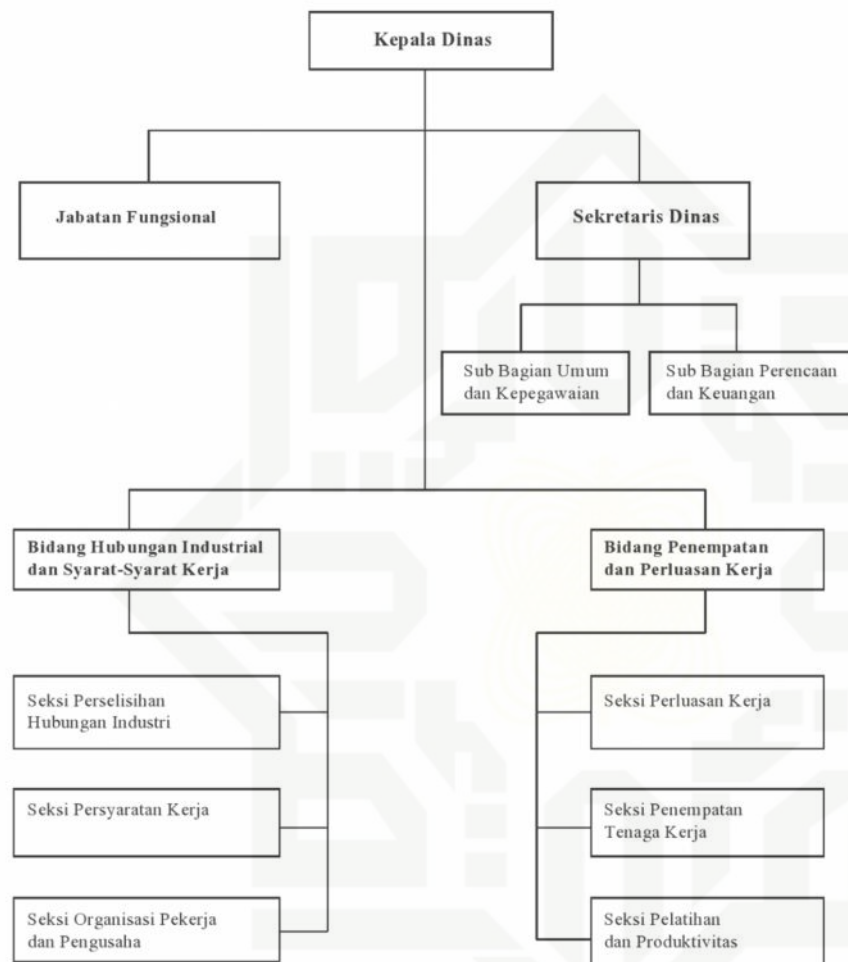
4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan

Berikut ini struktur organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten pelalawan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Pelalawan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penempatan tenaga kerja lokal di Kabupaten Pelalawan belum berjalan optimal. Banyaknya perusahaan yang berada di Kabupaten Pelalawan tidak menjadi jaminan bagi para pencari kerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan di daerah mereka sendiri dan banyak pencari kerja lokal yang tidak mengetahui tentang adanya lowongan pekerjaan baik dari Dinas Tenaga Kerja maupun dari perusahaan-perusahaan itu sendiri. Didalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2005 telah dijelaskan bahwa wajib lapor lowongan pekerjaan dan perusahaan wajib menggunakan tenaga kerja lokal dimana perusahaan tersebut berada dengan persentase 50% sampai 75%. Strategi dan kebijakan yang dibuat dan ditetapkan sudah berjalan baik tetapi dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik serta ketidaktegasan dalam pengawasan dan pemberian sanksi bagi pelanggar peraturan yang telah ditetapkan.
2. Kendala-kendala dalam penempatan tenaga kerja lokal di Kabupaten Pelalawan adalah keterampilan kerja atau skill yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar kerja, karena perusahaan-perusahaan yang berada di

3. Kabupaten Pelalawan kebanyakan bergerak dibidang Industri kertas dan kelapa sawit sedangkan pelatihan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan serta terbatasnya sarana prasarana dalam pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja para tenaga kerja menjadi kendala dalam penempatan tenaga kerja lokal di Kabupaten Pelalawan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Pelalawan, maka saran yang peneliti berikan sebagai berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar atau tidak melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2005 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat 1 yang berbunyi “Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah)”
2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan agar lebih gencar dalam mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2005 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal kepada perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Pelalawan dan memprioritaskan tenaga kerja lokal di Kabupaten Pelalawan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan program pelatihan harus sesuai dengan pasar kerja.
4. Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan lagi dan juga sumber daya manusia yang memberikan pelatihan harus yang berkompeten sehingga dapat menciptakan tenaga kerja lokal yang dapat bersaing dalam pasar kerja.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Un.04/F.VII/PP.00.9/4347/2020
Biasa
-
Izin Riset

Pekanbaru, 18 Desember 2020 M
3 Jumadil Awwal 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Jaka Saputra
NIM. : 11375103543
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : XV (Lima Belas)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Dalam Penempatan
Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Pelalawan". Untuk itu kami mohon kiranya
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
 Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
 PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI
Nomor : 504/DPMPTSP/2021/0001

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37488 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

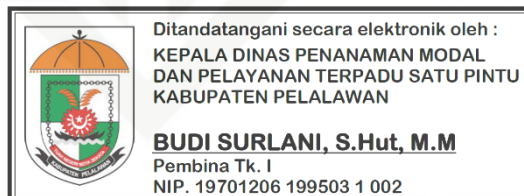
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | JAKA SAPUTRA |
| 2. NIM / KTP | : | 11375103543 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | TELUK BINJAI |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PELALAWAN DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DI KABUPATEN PELALAWAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PELALAWAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
 Pada tanggal 7 Januari 2021



Tembusan :

1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

DINAS TENAGA KERJA

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA
JL. KARYA PRAJA NO. PANGKALAN KERINCI - 28381

SURAT KETERANGAN

Nomor : 560/DTK/2021/67

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan, menerangkan bahwa :

Nama : JAKA SAPUTRA
NIM : 11375103543
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : UIN Suska Riau
Judul Skripsi : Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Pelalawan

Menerangkan bahwa nama yang tercantum diatas adalah benar telah melakukan Penelitian untuk keperluan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 20 Januari 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PELALAWAN

Ir. ABD. RAHMAN, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19621126 199401 1 00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Dokumentasi kegiatan penelitian setelah melakukan wawancara dengan kepala bidang penempatan dan perluasan kerja yaitu bapak Syamsul Alam, S.Sos

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi kegiatan penelitian setelah melakukan wawancara dengan kepala bidang penempatan dan perluasan kerja yaitu ibu Rahayati, SE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap **JAKA SAPUTRA**, Lahir di desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. pada 28 Mei 1995, anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Kasri dan Ibunda Yunarti.

Pendidikan Formal penulis dimulai pada tahun 2000, sekolah di SDN 010 Teluk Binjai dan menamatkannya pada tahun 2007,

kemudian penulis melanjutkan Sekolah di SMPN 1 Teluk Meranti dan menamatkannya pada tahun 2010. Selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah di SMAN 1 Teluk Meranti dan menamatkan pendidikannya pada tahun 2013.

Keinginan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tercapai setelah diterima sebagai mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2013. Penulis juga melakukan kerja Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada tahun 2015 di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2016 di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada tahun 2020 penulis melakukan penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dengan judul penelitian **“Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Pelalawan”**. Hasil penelitian tersebut kemudian diujikan dalam sidang Munaqasah (Oral Comprehensive) pada tanggal 05 Februari 2021 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Alhamdulillah peneliti dinyatakan **LULUS** dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).